

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya (Sukirno,2004:9).

Menurut Todaro (2003:92), ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah: (1) akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia (2) pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah tenaga kerja, dan (3) kemajuan teknologi.

Penyusunan APBD dimulai dengan adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja

pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* dalam hal ini pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting (Darwanto, et al., 2007).

Pentingnya penyusunan anggaran akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan apabila belanja modal dialokasikan secara tepat. Sehingga segala sesuatu hal yang dibutuhkan pada provinsi yang bersangkutan dapat terpenuhi.

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno,2000).

Berikut ditampilkan data APBD Kota Kupang sejak tahun 2015-2020 pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Kupang Tahun 2015-2019 (Miliar)

Tahun	PDRB (Rp)	Perkembangan	
		(Rp)	%
2015	12.953.370.000	965.940.000	-
2016	13.826.090.000	872.720.000	3,71
2017	14.770.130.000	944.040.000	4,13
2018	15.772.260.000	1.002.130.000	3,99
2019	16.763.890.000	991.630.000	3,56

Sumber : BPS Kota Kupang, 2015-2019

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas untuk melihat pertumbuhan ekonomi pada Kota Kupang berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan selama 5 tahun mengalami Fluktuasi dari 2015 sampai 2019. Pada tahun 2015 sampai 2019 yang terus mengalami peningkatan yang disebabkan oleh perubahan harga dan perubahan volume atau kualitas yang cenderung terus meningkat.

Berdasarkan data belanja modal yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Kupang untuk data belanja modal di Kota Kupang Tahun 2010 sampai 2014 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Belanja Modal Kota Kupang Tahun 2015-2019

Tahun	Belanja modal	Perkembangan	
		Rp	%
2015	151.327.467.000	50.127.322	-
2016	237.652.322.000	86.324.855	57,04
2017	306.295.066.000	68.642.744	28,88
2018	219.103.993.000	-87.191.073	-28,48
2019	229.975.728.000	10.871.735	4,96

Sumber : BPS Kota Kupang, 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menggambarkan data Belanja Modal Pada Kota Kupang selama 5 tahun mengalami Fluktuasi dari tahun 2015 sampai 2019.

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) juga merupakan perubahan nilai kegiatan ekonomi dari tahun untuk satu periode ke periode yang lain dengan mengambil rata-ratanya dalam waktu yang sama, maka untuk mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) juga merupakan perubahan nilai kegiatan ekonomi dari tahun untuk satu periode ke periode yang lain dengan mengambil rata-ratanya dalam waktu yang sama, maka untuk mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan nasional dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di daerah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Pertambahan pendapatan masyarakatnya meningkat dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Peran pemerintah dalam meningkatkan IPM juga dapat berpengaruh melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik (Mirza, 2012).

Peran pemerintah dalam kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Upaya-upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan sosial ekonomi yang dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri (Akudugu, 2012).

Menurut Pratowo (2012) keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan parameter yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal *Human Development Indeks (HDI)* merupakan suatu konsep dari program UNDP untuk

menanggulangi kemiskinan dengan prioritas yaitu 3 standar indeks yang tersusun secara sistematis yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli (Hariwan dan Swaningrum,2015).

Aspek pembangunan manusia menjadi salah satu indikator dalam menentukan kemajuan dari suatu daerah (Dianaputra dan Aswitari, 2017). Mirza (2011) menyatakan bahwa IPM merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat kualitas hidup manusia yang diukur melalui kualitas kesehatan, tingkat pendidikan dan ekonomi (daya beli). Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tergantung pada komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Rustariyuni, 2014).

Tabel 1.3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kupang

Tahun	IPM	Persentase (%)
2015	77,95	-
2016	78,14	0,24
2017	78,25	0,14
2018	78,84	0,75
2019	79,55	0,90

Sumber : BPS Kota Kupang Tahun 2015-2019.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat kita lihat data IPM berdasarkan sejak tahun 2015-2019, dimana sejak tahun 2015, IPM sebesar 77,95% terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 , dengan jumlah sebesar 79,71%.

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli.

Menurut Halim (2007), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu mengeluarkan belanja pemerintah dengan efektif untuk menopang aktivitas perekonomian seperti pembangunan sarana prasarana publik, selain itu dengan tepatnya mengalokasikan belanja pemerintah maka diharapkan pendapatan daerah juga dapat mengalami peningkatan (Kusuma, 2016). Belanja modal hendaknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melaksanakan aktivitas pembangunan (Yovita, 2011).

Modebe,dkk(2012) juga berpendapat bahwa adanya infrastruktur berkualitas maka produktivitas juga akan meningkat. Belanja modal yang meningkat diharapkan bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik agar lebih baik karena aset tetap daerah yang meningkat merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat adalah hasil dari pengeluaran belanja modal.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* dalam hal ini pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting (Darwanto, et al., 2007).

Pentingnya penyusunan anggaran akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang nantinya juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badrudin (2011) mengatakan bahwa keberhasilan Pembangunan Ekonomi tidak hanya didasarkan pada kecepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan apabila belanja modal dialokasikan secara tepat.

Menurut Mirza (2011) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Menurut Mirza (2011) keterkaitan antara belanja modal dengan kesejahteraan masyarakat yang digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat erat karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak hanya sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (*National Character Building*) seperti kejujuran, keadilan, keiklasan, kesederhanaan dan keteladanan.

Penelitian terdahulu oleh Sita (2017) yang berjudul pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh yang positif dari belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, dan belanja ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan (APBD) Pemerintah Daerah di Pulau Kalimantan tahun 2006 hingga tahun 2013.

Penelitian terdahulu oleh Roffi & Ardyan (2017) yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Artinya apabila terjadi peningkatan pertumbuhan

ekonomi sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan peningkatan tenaga kerjasebesar 0,024 satuan atau sebaliknya.Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh Belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kota Kupang.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitianini adalah pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Kupang

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusanmasalahpenelitian di atas maka yang menjadi persoalan penelitian adalah :

- a. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Kupang.
- b. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Kupang

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitia

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Kupang.

2. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Kupang.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Kemanfaatan Akademik

Secara akademik manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai sumber wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Kupang.

b. Kemanfaatan Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kota Kupang dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.